

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V. 1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan pembahasan mengenai tinjauan atas penyusunan tuntutan ganti rugi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

1. Tuntutan ganti rugi menjadi mekanisme penting untuk memulihkan kerugian negara akibat kelalaian atau tindakan melanggar hukum oleh pegawai negeri atau pejabat publik. Tindakan ini tidak hanya mencakup kerugian materiil tetapi juga imateriil, yang memerlukan penilaian dan verifikasi yang cermat.
2. Penggunaan aplikasi e-Auditee oleh BPK untuk mengelola data temuan dan setoran wajib bayar merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa pengelolaan piutang negara dan tuntutan ganti rugi dilakukan secara efektif dan transparan. Dengan aplikasi ini, proses pemantauan dan pelacakan kasus menjadi lebih mudah dan terstruktur, sehingga mendukung tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel.

V. 2 Saran

Beberapa saran yang mungkin berguna untuk pihak-pihak lain terutama untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih aktif dalam mengedukasi pegawai negeri dan pejabat publik mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan konsekuensi dari tindakan melanggar hukum. Ini dapat dilakukan melalui program penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai tanggung jawab keuangan.
2. Penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi e-Auditee harus terus dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan piutang dan tuntutan ganti rugi. Pemerintah harus memastikan

bahwa sistem ini selalu diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan terbaru, serta memberikan dukungan teknis yang memadai bagi pengguna.

3. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh proses dan prosedur yang terkait dengan tuntutan ganti rugi. Evaluasi ini harus mencakup analisis kinerja, identifikasi masalah, dan pengembangan solusi yang inovatif. Dengan demikian, pemerintah dapat terus memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tata kelola yang lebih baik dan terpercaya.